BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan kota merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan kebutuhan yang selalu timbul berupa perkembangan kota yang berhubungan dengan cepatnya laju perkembangan penduduk serta aktifitas yang dilakukannya.

Laju pertumbuhan penduduk kota yang semakin cepat secara otomatis menimbulkan pertambahan penduduk disuatu kota dengan segala problematikanya dan menuntut penataan yang lebih baik untuk mempertahankan atau meningkatkan kenyamanan kota tersebut. Kecepatan peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kecepatan pembangunan kota akan menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas, pengangguran serta lingkungan kumuh dan lain-lain.

Permasalahan utama yang muncul di perkotaan adalah berkaitan dengan upaya penataan pemukiman sebagai akibat makin bertambahnya animo masyarakat untuk menetap dan tinggal di kota. Kota yang merupakan pusat berlangsungnya kegiatan masyarakat, mengingat tersedianya berbagai sarana dan prasarana misalnya pasar, rumah sakit, dan industri. Ditengah-tengah pertumbuhan penduduk kota yang semakin

menimbulkan masalah yang lebih besar. Seperti masalah lingkungan.

Masalah kesehatan dan masalah estetika.

Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang ada di Jawa Tengah selain memiliki keistimewaan sebagai kota kerajaan yang terkenal dengan budayanya dan sebagai kota pelajar juga memiliki persoalan perkotaan yang sama dengan kota-kota lainnya. Sebagai kota budaya Yogyakarta banyak dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit. Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengusahakan agar jogja selalu menjadi kota yang lebih baik. Untuk mengatasi persoalan tersebut terutama dalam hal persampahan yang ada diperkotaan maka Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan beberapa Peraturan Daerah untuk mengatasinya.

Pengelolaan sampah Kota Yogyakarta ada dibawah koordinasi
Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman bekerjasama dengan
instansi lain yang terkait dan juga masyarakat. Hal ini didasari dari
penetapan dari kebijakan pengelolaan persampahan yang baik. Kebijakan
program ini sangat penting sebagai pedoman kerja semua aparat yang
terlibat dalam pengelolaan persampahan dan juga masyarakat.

Saat ini sebagian besar wilayah Jogja masih kotor dan berbau.

Padahal, Kota Jogja sendiri memiliki banyak predikat sebagai kota pelajar,
pariwisata dan lainnya ²

Masalah kebersihan hendaknya mendapat perhatian dar

belum terangkut dan masih mengotori wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Padahal sarana dan prasarana kebersihan menjadi anak emas pada APBD. Misalkan saja sepeda motor sampah, back holder, bak sampah mini, truk, dan incenerator.

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesulitan yang ditemui dan dihadapi oleh manusia dan oleh karena itu manusia jadi ingin mengetahui, membahas serta mengkaji untuk memecahkan masalah tersebut.

Rumusan masalah adalah formulasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas rumusan masalah yang akan diajukan adalah:

- 1. Bagaimana perubahan yang terjadi pada faktor eksternal dan faktor internal Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman kota Yogyakarta?
- 2. Isu strategis apa yang ada di Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kota Yogyakarta?
- 3. Stratègi apa yang dilakukan Dinas Kebersihan, Keindahan dan Bamakaman dalam maningkatkan kebersihan Kata Vagyakarta perioda

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabelvariabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep, definisi tertentu. Unsur yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian adalah teori. Karena dengan unsur inilah penulis akan mencoba menjelaskan permasalahan yang terjadi.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengatakan tentang teori:

"Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari satu proporsisi atau lebih."

Lebih jelasnya diungkapkan lebih lanjut sebagai berikut :

"Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak.definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep."

1. Manajemen Strategis

a. Pengertian

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen strategis:

1) Henry M Boetinger 5

Berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni yang menbutuhkan tiga unsur yaitu :

- Pandangan seniman
- Pengetahuan dan teknis
- Teknik dan komunikasi yang berhasil

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta. 1989, hal.12.

⁵ Pengantar Manajemen dan Pengambilan Keputusan Stratejik, tahun 1995, Jakarta, hal 39.

Dalam hal ini manajemen mrupakan suatu seni, maka manajeman memerlukan tiga unsur tersebut. Oleh karena itu ketrampilan manajemen, ketrampilan seni juga dikembangkan melalui training. Ketrampilan manajemen juga dikembangkan dengan cara yang sama.

2) Luther Gulick⁶

Mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mangapa dan bagaimana orang-orang dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Manajeman memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahuntahun dan telah diatur menjadi serangkaian teori-teori.

3) I.H. Walson dan Oey Liang Lie⁷

Manajemen dinyatakan bahwa, manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajeman memiliki asas-asas seperti ilmu lainnyayang isebut "asas manajeman". Manajeman dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapaian tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan

- Memimpin ini menunjukkan bagaimana para pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk tugas tertentu.
- Pengawasan, para pemimpin berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerah pada arah atau jalur tujuan, apabila organisasi berjalan pada jalur yang salah maka para pemimpin berusaha mencari permasalahannyadan mengembalkan pada jalur yang benar.

Dalam kegiatan kegiatan ekonomi straegi adalh rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancanguntuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapaimelaui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka yang dimaksud strategi dalam peelitiab ini adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapao sasaran khusus.

Jadi, manajemen strategis adalh sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyususnan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi dalam upaya pencapaian tujuan karena pemimpin setiap organisasi berupaya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi apaun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis

adalah arati néraga rintrik managnal tribian tawahirt

h) Membantu perilaku yang lebih terintegrasi dan individu untuk mencaai total effort.

c. Tahap-tahap Manajemen Strategis

Mengingat perumusan langkah strategis penelitian ini menggunakan model manajemen strategis, maka dalam menganalisa dan digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut, yang dalam hal ini dibagi dalam beberapa tahapan proses sebagai berikut:

1) Dentifikasi mandat dan misi organisasi

Mandat merupakan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya termasuk yang diharapkan dari masyarakat lokal sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Mandat dari sisi inilah yang digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi itu.

Langkah pertama dalam perencanaan strategis ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali apa yang sebenarnya. Pengidentifkasian ini dilakukan dengan mengkomparasikan antara eraturan perundangan yang berlaku

2) Analisis Lingkungan Strategis

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektifdan mengkaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (strenght)dan kelemahan (weakness), sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang (oportunities) dan ancaman (threats). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (stenght, weakness, oportunities, threats) untuk merumuskan isu strategis pada tahapan analisis berikutnya.

- Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap :
 - a) Sumber data yang dimiliki (input) meliputi : SDM, dana, sarana/fasilitas, struktur dan budaya organisasi.
 - b) Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input
 - c) Kinerja (output) yang dicapai saat ini.
- Sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui:
 - a) Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan.
 - b) Mengamati steakholder luar yang berpengaruh secara client, customers, para pembuat kebijakan (DPRD)
 - A Managemeti competitor den collaboratore vena ada

3) Analisis Isu Strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Karena isu strategis pertanyaan, kebijakan mendasar yang harus ditemukan jawabannyadalam upaya mewujudkan mandat dan misi organisasi. Dalam mengidentifikasi isu strategis studi ini menggunakan pendekatan langsung (the direct approach) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mempelajari visi dan misi.
- b) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman.
- c) Mengidentifikasi isu-isu strategisnya.

4) Analisis Critical Isu Strategis

Proses mengidentifikasi isu strategis merupakan proses yang cukup rumit, sehingga perlu dilakukan berbagai pengujian lebih lanjut terhadap isu-isu strategis yang lebih berhasil diidentifikasi, karena bukan tidak mungkin isu itu tidak cukup strategis. Untuk itu diperlukan untuk alat ukur/tes untuk melihat seberapa strategis isu tesebut, sehingga terjaring isu-isu

honor etentarie (mitical etentaria icerne)

mempengaruhi bawahan dengan wibawa, kharisma, atau seni memimpin orang. Dengan ilmu manajeman seorang pemimpin mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik dan menentukan sikap, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.

4) James A.F. Stoner⁸

Mendefinisikan manajeman sebagai proses perencanaan pengkoordinasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

- Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan suatu manajeman yang didefinisikan sebagai suatu proses. Karena semua pemimpin memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan yang terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- Perencanaan, menunjukkan bahwa para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatab sebelum melakukan kegiatan pada suatu cara, rencana dan logika.
- Pengorganisasian, berarti para pemimpin mengkoordinir

b. Manfaat Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan jalan yang hendak ditenpuh untuk mencapai tujuan tersebut.

1) Manfaat Finansial

Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikan tingkat keuntungan meskipun tidak secara otomatis denagn menerapkan manajeman strategis.

2) Manfaat Non-Finansial

- a) Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- b) Menyiapkan pandanagan terhadap manajeman problem.
- c) Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhada aktifitas.
- d) Meminimumkan pengaruh dari perubahan.
- e) Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
- f) Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang.
- a) Mamunaldalan nanagunaan aymban daya dan syaldis syang

d. Perumusan Strategis

Pada dasarnya strategis merupakan garis besar (out line) respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah diidentifikasi.

Dalam perumusan strategis ini dilakukan pendekatan lima tahapan proses perumusan strategis sebagai berikut:

- Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- 2) Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif tersebut
- 3) Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala.
- 4) Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam empat tahun kedepan.

2. Kebersihan

Kebersihan adalah suatu keadaan bersih yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan yang berhubungan secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati

a. Sampah

Menurut Prof. dr Juli Soemirat Slamet, M.PH, Ph.D yang dimaksud dengan sampah adalah sesuatu yang bersifat padat dan sudah tidak diperlukan lagi oleh yang memilikinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sampah berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. 10

Dengan demikian, yang dimaksud sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa industri.

1) Jenis Sampah

Menrut dr. Indan Entjang sampah itu ada dua jenis yaitu:

- Garbage: sisa-sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang mudah membusuk.
- Rubbish: bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk.¹¹

Sedangkan jenis sampah menurut Prof. dr Juli Soemirat Slamet ada empat jenis yaitu:

- Sampah yang bisa membusuk
- Sampah yang tidak bisa membusuk
- Sampah yang berasal dari pembakaran misalnya: abu

Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada Univercity Press, 1996, hal. 152
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, Bakai Pustaka, 1990, hal. 776

¹¹ Indan Entjang, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, Hal. 152

b. Swasta

Pihak swasta hanya mengambil jenis sampah tertentu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku perusahaannya, misalnya: karton, plastik dan sebagainya

c. Pemerintah

Pemerintah mengelola semua jenis sampah dari tahap awal sampai tahap akhir.

3. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menerapkan negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas Desentralisasi dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

"Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan benuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hakhak asal usul daerah yang bersifat istimewa"

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut hanya memberikan aturan pokok tentang pembangunan wilayah Negar Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Desaentralisasi dan Dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-undang organiknya sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa, pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

tetap mencerminkan pemerintahan yang bersendikan atas dasar permusyawratan.

undang-undang organik Dalam yang mengatur Pemerintahan Daerah sekarang yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999, pengertian Pemerintah Daerah¹³ adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. adapun Perangkat daerah otonom adalah dinas-dinas yang membidangi berbagai bidang, dan termasuk didalamnya adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan pemakaman sebagai penindak lanjut dari Pemerintah Kota meningkatkan kebersihan. Yogyakarta dalam Untuk menyelenggarakan tugas membantu Kepla Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebersihan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Secara teoritis ada enam elemen utama yang membentuk pemerintahan daerah yaitu:¹⁴

- a) Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b) Adanya kelembagaan yang merupakan perwadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.

Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonom, Yogyakarta, 2000

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Karya Utama Surabaya, hal 12
 Affandi Nur Achmad, Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah, Dalam Strategi

kewenangan yang luas kepada daerah diharapkan daerah dapat dengan leluasa mengatur prakarsa sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluuh bidang pemerintahan. Kecuali kewenangan yang telah menjadi urusan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat itu antara lain meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan peradilan, moneter dab fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

D. Definisi Konsepsional Dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha menjelaskan mengenai pembatas pengertian suatu konsep dengan konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. 15

a. Manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membentu pencapaian sasaran.

.....

- b. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaanya.
- c. Meningkatkan merupakan suatu upaya untuk menyempurnakan dan memperbaiki yang telah ada.
- d. Kebersihan adalah keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan dan berhbungan secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh pancaindera dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan.

2. Definisi Operasional

Agar suatu penelitian dapat diukur maka variabelnya perlu dioperasionalkan. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. ¹⁶ Indikator-indikator tersebut adalah:

a. Internal:

- 1) Kecakupan sarana dan prasarana
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana baru

b. Eksternal:

- 1) Perilaku masyarakat Kota Yogyakarta
- 2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain
- 3) Teknologi penanganan sampah

c. Isu strategis:

- 1) Pelaksanaan teknis operasional pengelolaan kebersihan
- Kesesuaian regulasi teknis operasional dengan kebijakan yang berlaku

d. Strategi:

- Ketrampilan petugas dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bidang Kebersihan
- 3) Pemungutan retribusi sampah
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Tujuan Obyektif

- Untuk mengetahui strategi DKKP dalam meningkatkan
 Kebersihan Kota Yogyakarta.
- 2) Mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor pendorong

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berkaitan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Yogyakarta serta wilayah Kodya Yogyakarta.

3. Unit Analisis

Bahwa sumber data dalm penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. 18 Oleh karena itu sumber data utama dalm penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Adalah data yang diperloeh dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang saya maksud yaitu Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman Pemerintah Kota Yogyakarta serta masyarakat Yogyakarta

b. Data Sekunder

Adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung. Data ini terdiri dari internal data yang tersedia di lembaga yang diteliti serta eksternal data yang didapat dari sumber lain yang dapat mendukung kelengkapan data dari obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh dari literatur-literatur, masmedia dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman Pemkot Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang diolah dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode:

a. Wawancara (interview)

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian sengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber

wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, serta wawancara bebas yang bertujuan untuk mencegah hal yang tidak tertampung dalam wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi utama yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Petugas kebersihan.

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dalam bentuk laporan, literatur-literatur, masmedia dan dokumen-dokumen, internet.

5. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh. Data-data yang terkumpul akan dinterpretasikan sesuai dengan arti data yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan deskriptif dipakai untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini berusaha menggambarkan strategi DKKP dalam meningkatkan kebersihan.

Mengenai penelitian yang bersifat kualitatif, Winarno Surahmat menjelaskan sebagai berikut :

"Sifat dari bentuk penelitian deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya, tentang situasi yang dialami, Sifat sampah digolongkan menjadi:

- Sampah umum adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani secara langsung
- Sampah khusus adalah sampah yang menurut sifatnya harus diproses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut

Dari teori diatas penulis menyimpulkan bahwa jenis sampah pada dasarnya ada dua yaitu, sampah organik yang sifatnya bisa membusuk dan sampah organik yang tidak dapat membusuk..

Sampah yang berupa rubbish dan garbage ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan memunculkan persoalan, mengingat bahwa sampah merupakan salah satu sumber penyakit. Untuk itu pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang mengatur persoalan ini.

2) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Jadi pengelolaan berarti suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dipelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 12

Sampah ini berasal dari rumah tangga maupun sisa dari proses industri. Jadi pengelolaan sampah yang dimaksud adalah proses perumusan kebijaksaan pengelolaan sampah.

Proses pengelolaan sampah tersebut melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap pengumpulan dan Penampungan, pada tahap ini dilakukan pengumpulan sampah yang berasal dari rumah tangga dan juga yang berasal dari tempat-tempat umum misalnya pasar. Sampah tersebut dikumpulkan dalam tempat penampungan yang disebut *transfer depo*.
- b. Tahap pengangkutan, tahap ini merupakan tahap pengangkutan sampah dari transfer depo menuju ke pengolahan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- c. Tahap pengelolaan di TPA, ada beberapa sistem pengelolaan sampah di TPA diantaranya dengan controlled land fill, dimana sampah diratakan dan dipadatkan, setelah ketinggian mencapai satu meter segera ditutup dengan tanah.

Proses pengelolaan sampah dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu:

a. Perorangan

Setiap rumah tangga mengumpulkan sampah untuk

- Adanya personil pegawai yang bertugas untuk manjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah.
- d) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- e) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakilwakil rakyat yang mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan otonomi daerah.
- f) Adanya manajeman urusan otomi yaitu penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Menurut Undang-undang No 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa DPRD bukanlah bagian dari Pemerintah Daerah. Ia merupakan Badan Legislatif daerah sekaligus sebagai lembaga pengawasan pemerintah. Dengan demikian diharapkan aspirasi rakyat akan semakin tersalur dan kontrol masyarakatpun akan semakin kuat dan terbuka.

Berdaskan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan kedilan, demokratisasi dan penghormatan erhadap budaya lokal dengan

3) Mengetahui keberhasilan strategi DKKP dalam meningkatkan kebersihan

b. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana S1 di Universitas muhammadiyah Yogyakarta. Disamping itu penyusun juga berhadap penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan yang berkonsentrasi pada Manajemen Publik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai strategi DKKP dalam meningkatkan kebersihan Kota Yogyakarta.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat atau fihak yang terkait mengenai strategi DKKP dalam meningkatkan kebersikhan Kota Yogyakarta.
- bahan menjadi input yang nantinya akan c. Memberikan pertimbangan bagi pihak pelaksana dalam hal ini DKKP Kota Yogyakarta dimasa yang akan datang.